

**IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN BPOM TERHADAP  
PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK KOSMETIK SEBAGAI  
UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DI KOTA TANJUNG PINANG**

Oleh :  
**Muhamad Yudi Alfaro**  
**NIM. 160574201012**

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar tanpa mencantumkan label halal. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM memiliki peran penting terhadap peredaran kosmetik baik dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari standar yang ditentukan. Konsumen yang menggunakan produk kosmetik tentunya mempertimbangkan apakah produk kosmetik telah memiliki sertifikasi label halal. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peran pengawasan BPOM terhadap label halal pada produk kosmetik di Kota Tanjungpinang dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam perlindungan konsumen terhadap masuknya produk kosmetik tanpa label halal di kota Tanjungpinang belum terlaksana dengan baik, dimana adanya ditemukan produk kosmetik tanpa label halal beredar, dikarenakan BPOM kurang memaksimalkan tugasnya dengan baik. Hal ini didasari oleh masih banyaknya pelanggaran produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen, maupun undang-undang lainnya dan jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, BPSK siap menyelesaikan kasus makanan tanpa label halal tersebut dengan cara konsoliasi, mediasi, dan arbitrase.

Kata Kunci : BPOM, Label Halal, Perlindungan Konsumen.

# **IMPLEMENTATION OF BPOM'S SUPERVISORY ROLE OF HALAL LABELING IN COSMETIC PRODUCTS AS AN EFFORT FOR CONSUMER PROTECTION IN THE CITY OF TANJUNG PINANG**

**By :**  
**Muhamad Yudi Alfaro**  
**NIM. 160574201012**

## **ABSTRACT**

*This thesis discusses the role of the Food and Drug Supervisory Agency in supervising cosmetic products that are in circulation without including a halal label. BPOM is a Non-Ministerial Government Agency (LPNK) whose job is to oversee the distribution of drugs, traditional medicines, health supplements, cosmetics and food in the territory of Indonesia. BPOM has an important role in the distribution of cosmetics both in terms of quality, efficacy and benefits of the specified standards. Consumers who use cosmetic products certainly consider whether cosmetic products have halal label certification. The main problem in this research is how is the implementation of BPOM's supervisory role for halal labels on cosmetic products in Tanjungpinang City and how is consumer protection for products that do not carry halal labels in the City Tanjungpinang. The research method used is normative-empirical research. Empirical normative legal research is legal research regarding the application of normative legal provisions (laws) to every event that occurs in a society. From the results of the research, it is known that consumer protection against the entry of cosmetic products without a halal label in the city of Tanjungpinang has not been carried out properly, where cosmetic products without a halal label are found circulating, because BPOM has not maximized its work properly. This is based on the fact that there are still many cosmetic product violations that are not in accordance with laws and regulations and also conflict with consumer protection laws, as well as other laws and if there is a dispute between consumers and business actors, BPSK is ready to resolve cases of food without a halal label. through conciliation, mediation and arbitration.*

**Keywords:** BPOM, Halal Label, Consumer Protection.